KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sejumlah Fraksi Ingin Segera Akhiri Angket KPK
Tanggal : Selasa, 16 Januari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7

Sejumlah Fraksi Ingin Segera Akhiri Angket KPK

Golkar mengancam menarik seluruh anggotanya.

Maya Ayu Puspitasari
maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat sepakat segera menyelesaikan kerja Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Panitia yang dibentuk pada Mei 2017 itu bakal menyelesaikan tugasnya pada akhir masa sidang 15 Februari mendatang.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eddy Kusuma Wijaya, mengatakan Panitia Angket KPK memang bakal berakhir pada pertengahan Februari mendatang. "Enggak dipercepat," katanya di Kompleks Senayan, kemarin. Ia menuturkan, rekomendasi yang bakal dikeluarkan bakal memperkuat KPK. "Sejak awal tidak ada niat melemahkan. Misalnya ada penyimpangan, itu dikembalikan lagi ke prosedur hukum yang berlaku," kata Wakil Ketua Panitia Angket KPK itu.

Anggota Fraksi PDIP yang lain, Arteria Dahlan, menyebut rekomendasi Panitia Angket tidak akan berbeda jauh dengan rekomendasi pendahuluan yang telah disusun. Menurut dia, bakal aneh jika nantinya rekomendasi final berbeda dengan rancangan yang sudah dibahas di awal. "Kalau rekomendasi berbeda, ini perlu dipertanyakan. Ada apa dengan muka DPR? Sejauh ini Panitia Angket masih konsisten. Apa yang kami temukan akan kami sampaikan," kata dia.

Terbentuknya Panitia Angket KPK bermula dari kegeraman sejumlah anggota DPR terhadap KPK yang menuduh sejumlah anggota Komisi Hukum menekan saksi kasus korupsi *e-KTP*, Miryam S. Haryani. Bambang Soesatyo—saat itu Ketua Komisi Hukum—dituding terlibat dalam mempengaruhi Miryam. Dalam rapat dengar pendapat Komisi Hukum DPR dengan KPK pada 18 April 2017, Bambang menggulirkan usul pembentukan hak angket untuk memaksa KPK membuka rekaman penyidikan Miryam.

Setelah terbentuk, penyelidikan Panitia Angket meluas dan terkesan mencari-cari kesalahan KPK. Salah satunya adalah mendatangi dan meminta keterangan para terpidana kasus korupsi untuk menelusuri adanya kesalahan prosedur saat penindakan. Belakangan, kinerja Panitia Angket juga mengarah pada pelemahan KPK dan mendorong revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rekomendasi pendahuluan yang disusun Panitia Angket pada September lalu menyebut ada lima poin untuk perbaikan lembaga antirasuah. Di antaranya, dalam aspek kelembagaan, kewenangan KPK akan dilucuti sebatas pada fungsi koordinasi dan supervisi. Sedangkan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dikembalikan ke institusi penegak hukum. Selain itu, Panitia Angket merekomendasikan perubahan Undang-Undang KPK.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengatakan, apa pun temuan Panitia Angket bakal disampaikan ke KPK. Menurut dia, Panitia Angket sudah memperoleh banyak data untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi. "Kalau misal ada hal-hal yang lemah di KPK selama ini, itu rekomendasi untuk memperkuat," kata Yandri.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta agar kerja Panitia Angket segera diakhiri. Airlangga menuturkan, pembahasan hak angket KPK sudah memasuki tiga kali masa sidang dan perlu segera berakhir. Ia bahkan menarik Bambang Soesatyo dari keanggotaan Panitia Angket dan mengancam bakal menarik seluruh anggota Golkar yang terlibat Panitia Angket jika tak ada rekomendasi yang keluar hingga 14 Februari mendatang. "Salah satu yang menjadi target (Golkar) adalah menyelesaikan Panitia Angket KPK," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, sepakat dengan Airlangga. Ia mengatakan sebelas temuan Panitia Angket KPK sudah cukup bagi Pansus untuk segera menetapkan rekomendasi final. "PPP menyambut baik dan mari bersama-sama akhiri Pansus-nya," kata Arsul. "Lebih cepat, lebih baik.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Nurdin Tampubolon, mengatakan Panitia Angket KPK tidak perlu memperpanjang masa kerjanya. "Kami tidak mau mengintervensi kerja KPK," kata dia.

● INDRI MAULIDAR | ADAM PRIREZA